

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
**The Influence Of Development, Poverty, And The Amount Of Infaq Payments
On The Human Development Index In West Java Province.**

Andrean Permadi¹, Imam Nur Ngaini², Mauridatul Fadillah³

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

e-mail: andreanpermadi9@gmail.com, imam.nurngaini@gmail.com, fadilladilla962@gmail.com

Article History

Received: 18-3-2025

Reviewed: 27-3-2025

Published : 12-4-2025

Key Words

Human Development Index, Unemployment, Poverty, Zakat Payments

Abstract : West Java Province continues to face serious challenges in the socio-economic sector, particularly regarding the high unemployment rate. The imbalance between the number Of available workers and employment opportunities has triggered various negative impacts, such as decreased household income and increased crime rates. This study aims to analyze the influence of unemployment, poverty, and the amount of infaq payments on the Human Development Index (HDI). The research was conducted across regencies/cities in West Java Province over the 2020–2024 period, using 135 observations and panel data regression analysis. The research findings are as follows: (1) The unemployment variable partially has no Significant effect on the Human Development Index in West Java Province. The t-statistic value Is $0.330285 < t\text{-table } 2.059538$ with a significance level of $0.7418 > 0.05$, thus H_0 is accepted And H_1 is rejected. (2) The poverty variable partially has no significant effect on the Human Development Index in West Java Province. The t-statistic value is $0.375931 < t\text{-table } 2.059538$ with a significance level of $0.7077 > 0.05$, thus H_0 is accepted and H_1 is rejected. (3) The infaq payment variable partially has no significant effect on the Human Development Index in West Java Province. The t-statistic value is $-0.779871 < t\text{-table } 2.059538$ with a significance level of $0.4372 > 0.05$, thus H_0 is accepted and H_1 is rejected. (4) However, the variables of Unemployment, poverty, and infaq payments simultaneously have a significant effect on the Human Development Index in West Java Province. The F-statistic value is $3032.914 > F\text{-table } 3.027998$ with a significance level of $0.000000 < 0.05$, thus H_0 is rejected and H_1 is accepted.

Sejarah Artikel

Diterima: 18-3-2025

Direview: 27-3-2025

Diterbitkan : 12-4-2025

Kata Kunci

Abstrak Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sosial ekonomi, terutama terkait tingginya tingkat pengangguran. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia telah memicu berbagai dampak negatif, seperti menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan dan jumlah

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
Indeks Pembangunan manusia, Pengangguran, Kemiskinan, Pembayaran Infaq pembayaran infaq terhadap index pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024 sebanyak 135 observasi dengan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitiannya: (1) Variabel pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Nilai t-hitung $0,330285 < t\text{-tabel } 2,059538$ dengan nilai signifikansi $0,7418 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. (2) Variabel kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Nilai t-hitung $0,375931 < t\text{-tabel } 2,059538$ dengan nilai signifikansi $0,7077 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. (3) Variabel jumlah pembayaran infaq secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Nilai t-hitung $(-0,779871) < t\text{-tabel } 2,059538$ dengan nilai signifikansi $0,4372 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. (3) Variabel Pengangguran, kemiskinan, dan Jumlah Pembayaran Infaq secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap index pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Nilai F-hitung $3032,914 > F\text{-tabel } 3032,914$ dengan tingkat signifikansi $0.000000 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

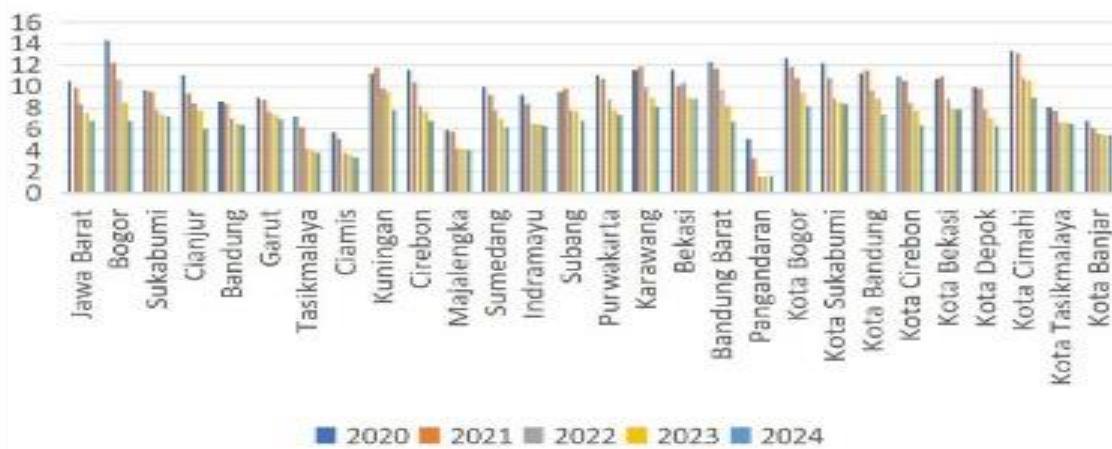
<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi makro, pengangguran merupakan kegagalan dalam mencapai sasaran fundamental, yaitu kondisi full employment, yakni seluruh tenaga kerja terserap secara optimal. Fenomena ini pula yang menjadi fokus utama berbagai kebijakan ekonomi makro yang dirancang untuk menekan angka pengangguran dengan cara mengakseserasi pertumbuhan ekonomi (Abdul Aziz dan Abdul Husenudin 2024). Salah satu faktor utama penyebab pengangguran adalah belum siapnya tenaga kerja, baik dari aspek jumlah maupun mutu. Ketimpangan tersebut mampu memperlambat laju perekonomian dan berdampak langsung terhadap penurunan tingkat pengeluaran konsumen terhadap barang serta jasa.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar I. Grafik Pengangguran Terbuka Jawa Barat

Berdasarkan visualisasi data pada gambar I, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT di provinsi ini tercatat sebesar 10,46%. Setahun kemudian, angka tersebut menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar 0,64%, menjadi 9,82% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan sebesar 1,87% menjadi 11,69%. Tren tersebut kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan menjadi 10,77% pada tahun 2023, dan terus mengalami penurunan sebesar 0,69% pada tahun 2024, hingga mencapai 6,75%.

Sementara itu, persoalan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Secara konseptual, kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar hidup yang berlaku di

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya wilayah tempat tinggalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan lokal, tetapi merupakan fenomena global yang dihadapi oleh banyak negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Grafik Penduduk Miskin Jawa Barat

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 2, tren jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,88%. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 8,4% atau mengalami peningkatan sebesar 0,52%. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,34% sehingga angka kemiskinan mencapai 8,06%. Perbaikan kondisi sosial ekonomi kembali terlihat pada tahun 2023, yaitu angka kemiskinan menurun sebesar 0,44% menjadi 7,62% dan tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan tambahan penurunan sebesar 0,16% sehingga angka kemiskinan di Jawa Barat berada pada angka 7,46%.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana kondisi kesejahteraan sosial sebagian penduduknya masih di bawah standar hidup layak. Dalam konteks nilai-nilai Islam, kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang memerlukan perhatian kolektif. Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial melalui anjuran untuk saling berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya mencerminkan kepedulian spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme nyata

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya untuk mendukung redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, individu yang telah mencapai kecukupan ekonomi bahkan dituntut untuk menyisihkan sebagian kekayaannya untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu(Permadi dkk. 2023).

Tabel I Data pembayaran Infaq Jawa Barat

Tahun	Jumlah Pembayaran Infaq di Jawa Barat (Milyar)
2020	1.836.157.528
2021	1.810.877.818
2022	6.164.823.718
2023	5.051.997.645
2024	11.149.315.357

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Merujuk pada data yang disajikan pada Gambar 3, pembayaran infaq di provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2020 dan 2021, nominal infaq yang terhimpun relatif stabil yaitu sebesar Rp1 miliar. Peningkatan signifikan tercatat pada tahun 2022 dengan lonjakan hingga mencapai Rp6 miliar. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan hingga mencapai Rp5 Miliar. Namun, pada tahun 2024 pembayaran infaq kembali melonjak tajam yaitu mencapai Rp11 miliar yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sumbangan sosial berbasis keagamaan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk suatu daerah. Penurunan capaian IPM dapat berimplikasi langsung terhadap penurunan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya berdampak pada penurunan pendapatan dan peningkatan angka kemiskinan(Permadi dkk. 2023).

Masyarakat yang sehat dengan akses pendidikan yang baik cenderung menunjukkan produktivitas yang tinggi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan konsumsi dan penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, IPM yang rendah berdampak pada Produktivitas penduduk yang lemah, yang kemudian berdampak pada pendapatan yang rendah dan berujung pada tingginya tingkat kemiskinan(Rahayu 2018) .

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Grafik IPM Jawa Barat

Berdasarkan gambar 4 perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, IPM Jawa Barat tercatat sebesar 72,61, kemudian meningkat sebesar 0,35 poin pada tahun 2021 menjadi 72,96. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 0,67 poin yang mendorong angka IPM menjadi 73,63. Selanjutnya pada tahun 2023, IPM kembali meningkat sebesar 0,61 poin dan mencapai 74,24. Data ini mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah secara berkelanjutan.

Tingkat pembangunan manusia Yang tinggi memegang peranan penting Dalam meningkatkan kemampuan Individu dalam mengakses dan Mengelola sumber-sumber pertumbuhan Ekonomi, termasuk pemanfaatan teknologi dan pencapaian keseimbangan ekonomi(Nyoman Lily Santika Dewi dan I. Ketut Sutrisna 2014). Dalam paradigma pembangunan kontemporer, Pertumbuhan ekonomi tidak lagi diukur hanya dari aspek kuantitatif, tetapi harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari capaian pembangunan manusia.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, periode 2020-2024 dan pendekatan analisis yang diterapkan secara umum merupakan metode kuantitatif, yang digunakan untuk mengkaji pengaruh variabel Pengangguran, kemiskinan, dan jumlah Pembayaran infaq terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan termasuk dalam kategori data runtun waktu (time series) serta data antar unit (cross section), yang kemudian dikombinasikan pada bentuk data panel suatu struktur data yang memadukan karakteristik keduanya.Proses analisis dilakukan melalui regresi data panel,

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya melalui memanfaatkan perangkat lunak Eviews 10 sebagai alat utama untuk mengolah data dan menjalankan estimasi model. Selain itu, Microsoft Excel digunakan sebagai perangkat bantu dalam proses transformasi data mentah dari sumber primer ke dalam format yang lebih sesuai dan kompatibel dengan kebutuhan analisis statistik(Yusuf dkk. 2025).

Langkah-langkah dari analisis kuantitatif meliputi estimasi model regresi data panel yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random effect Model (REM), selanjutnya dilakukan uji untuk memilih model terbaik dari estimasi data panel. Uji pertama yang dilakukan adalah Uji Chow kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman, jika terdapat perbedaan model yang terpilih maka dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier (LM). Untuk pengujian yang terakhir ada Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji-t, UjiF, dan Uji Koefisien Determinasi.

Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber yang telah terlebih dahulu dikumpulkan, diarsipkan, dan didokumentasikan oleh pihak lain, namun tetap relevan dengan fokus penelitian ini. Umumnya, jenis data ini dapat diakses melalui sejumlah media, seperti buku referensi, arsip historis, laporan resmi lembaga pemerintah, serta dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

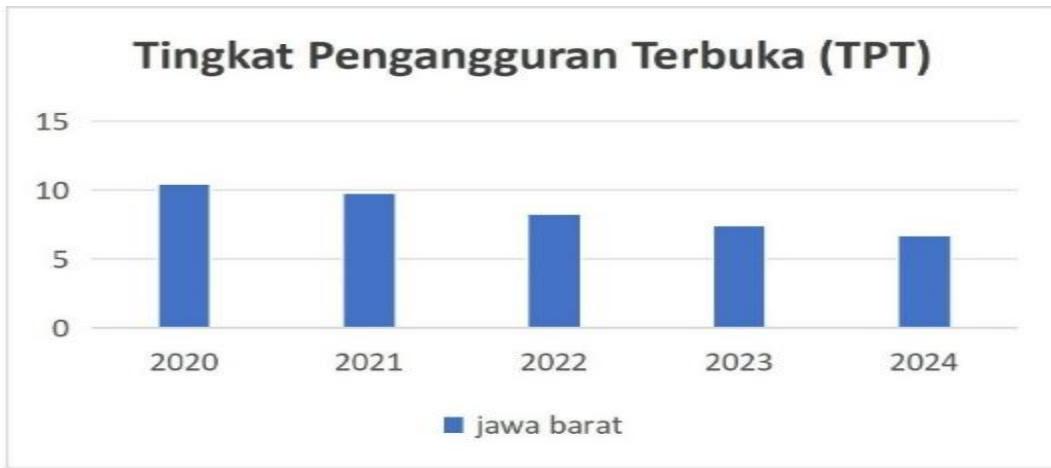
Topografi wilayah Jawa Barat menunjukkan dataran rendah yang mendominasi bagian utara, sementara bagian tengah dan selatan didominasi oleh kawasan pegunungan. Kawasan hutan di provinsi ini memiliki fungsi ganda sebagai hutan lindung, kawasan konservasi, serta hutan produksi, dengan luasan mencapai 22,10% dari total wilayah. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Provinsi Banten di sebelah barat, DKI Jakarta di utara, serta laut Jawa di bagian selatan. Pada akhir tahun 2015, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, yang mengatur luas wilayah administratif masing-masing kabupaten dan kota.

I. Pengangguran di Provinsi Jawa

Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019 mengusung empat pilar strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

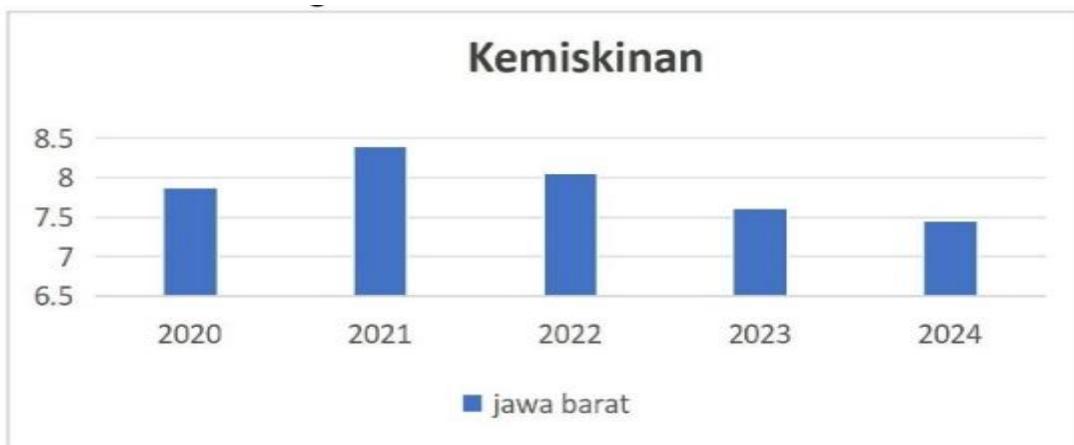


Gambar 4. Gafik TPT

Gambar di atas menunjukkan bahwa di tingkat Provinsi, Jawa Barat tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di indonesia. Perkembangan data menunjukkan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tercatat sebesar 6,75%, mengalami penurunan dibandingkan dengan 7,44% pada tahun 2023. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan lapangan kerja, ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia industri, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

2. Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat merupakan persoalan sosial-ekonomi yang kompleks dan terus berubah seiring waktu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk miskin di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan, dari 7,46% pada maret 2024 menjadi 7,08% pada september 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sekitar 3,67 juta jiwa.



Gambar 5. Anggka Kemiskinan Jawa Barat

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Data grafis yang disajikan memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai puncaknya pada tahun 2021, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Salah satu dampak yang cukup terasa dari pandemi COVID-19 adalah peningkatan angka kemiskinan di wilayah ini. Menurut statistik BPS tahun 2021, persentase kemiskinan di Jawa Barat menempati posisi kedua tertinggi setelah DKI Jakarta.

3. Jumlah Pembayaran Infaq di Provinsi Jawa Barat

Berbeda dengan zakat yang memiliki batas minimum tertentu (nishab) infak tidak mensyaratkan jumlah tertentu dalam pengeluarannya. Infaq merupakan wujud kasih sayang, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hukum infak bersifat sunnah; artinya, seseorang yang menunaikan infak akan mendapatkan keberkahan dan pahala, sementara yang tidak menunaikannya tidak dikenai dosa. Dengan populasi Muslim yang besar di Jawa Barat, potensi penghimpunan infak di wilayah ini sangat besar. Namun demikian, realisasi penghimpunan infak masih belum mencapai potensi optimal. Pada tahun 2023, Jawa Barat menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebesar 3,7 triliun rupiah, namun realisasi yang tercapai baru sekitar 2,5 triliun rupiah.

Tabel 2 Jumlah Pembayaran Infaq di Jawa Barat

Tahun	Jumlah Pembayaran Infaq di Jawa Barat (Milyar)	Jumlah Pembayaran Zakat di Jawa Barat (Milyar)
2020	1.836.157.528	32.388.878.331
2021	1.182.892.048	65.857.723.834
2022	6.164.823.718	40.754.077.576
2023	5.051.997.645	61.384.093.769
2024	11.149.315.357	85.816.912.566

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

Merujuk pada diatas terlihat bahwa pembayaran infak di Jawa Barat mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, naik senilai 1.836 Miliar rupiah, namun pada tahun 2021 menurun sebesar 1.182 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 kembali naik dratis sebesar 6.164 Miliar rupiah dan pada tahun 2023 pembayaran infak kembali mengalami penurunan sebesar 5.051 Miliar Rupiah. Terakhir pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali yang tinggi sebesar 11.149 Miliar Rupiah.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

4. Index Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Indeks ini mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi yang meliputi tiga dimensi utama, yakni standar hidup yang layak yang diwakili oleh pendapatan riil per kapita; tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah; serta kesehatan serta kualitas lingkungan yang diindikasikan oleh angka harapan hidup (Ramadanisa dan Tri wahyuningtyas 2022).



Gambar 6. Grafik IPM Jawa Barat

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya selama periode 2020 sampai 2023. Pada tahun 2023, Jawa Barat mencatat nilai IPM sebesar 74,24%, menjadikannya provinsi dengan indeks pembangunan manusia tertinggi jika dibandingkan dengan dua provinsi tetangga, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun demikian, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mencatat IPM sebesar 81,07% pada tahun yang sama, Jawa Barat masih berada di bawah provinsi tersebut, sementara Jawa Timur menempati tempat terendah di antara ketiga provinsi tersebut.

Analisis Data

Estimasi Model Regresi Data Panel

I. Uji Chow

Hasil uji Chow penelitian ini disajikan dalam gambar I.I2 berikut

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1238.166936	(26,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	773.385275	26	0.0000

Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Gambar 7. Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil uji Chow yang disajikan pada Gambar 1.12 nilai probabilitas untuk uji crosssection F tercatat sebesar 0,0000, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hal ini mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1), sehingga dapat disimpulkan bahwa model efek tetap (Fixed Effect Model) memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan model efek umum (Common Effect Model).

2.Uji Hausman

Hasil dari uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.
Cross-section random	41.624433	3

Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Gambar 8. Hasil Uji Hausman Sumber: Data diolah dari Eviews 10

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Berdasarkan hasil uji Hausman pada Gamba 1.13, nilai probabilitas untuk uji cross-section random juga tercatat sebesar 0,0000, yang kembali menunjukkan nilai lebih rendah dari tingkat signifikansi 5%. Kondisi ini mengimplikasikan penolakan hipotesis nol (H_0) serta mendukung hipotesis alternatif (H_1), yang berarti model efek tetap (Fixed Effect Model) lebih sesuai serta unggul dibandingkan model efek acak (Random Effect Model). Oleh karena itu, model efek tetap dipilih sebagai model terbaik untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotensis

a. Uji-t (Parsial)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/17/25 **Time:** 20:06

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.709691	0.016614	223.2876	0.0000
X1	0.000196	0.000595	0.330285	0.7418
X2	-0.000825	0.002195	-0.375931	0.7077
X3	-0.000168	0.000216	-0.779871	0.4372

Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Gambar 9. Hasil Uji T Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Uji T ini berfungsi untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Penjelasan hasil uji adalah sebagai berikut:

Pada variabel Pengangguran (X1), nilai t hitung sebesar 0,330285 berada di bawah nilai t tabel 2,059538, dengan nilai signifikansi 0,7418 yang melebihi batas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_1) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang mengindikasikan bahwa variabel Pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Untuk variabel Kemiskinan (X2), nilai t hitung tercatat sebesar -0,375931, juga lebih kecil dari t tabel 2,059538, serta nilai signifikansi sebesar 0,7077 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_1 ditolak dan H_0 diterima, menandakan bahwa variabel Kemiskinan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Pada variabel Jumlah Pembayaran Infaq (X3), nilai t hitung adalah -0,779871 yang masih di bawah t tabel 2,059538, serta nilai signifikansi 0,4372 yang melebihi 0,05. Sehingga, H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti variabel Jumlah Pembayaran Infaq tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

b. Uji-F (Simultan)

R-squared	0.998808
Adjusted R-squared	0.998478
S.E. of regression	0.008481
Sum squared resid	0.007552
Log likelihood	469.3543
F-statistic	3032.914
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Gambar 10. Hasil Uji F

Nilai F hitung yang mencapai 3032,914 melebihi nilai F tabel sebesar 3,027998, disertai dengan nilai signifikansi 0,000000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pengangguran, Kemiskinan, dan Jumlah Pembayaran Infaq mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	0.998808
Adjusted R-squared	0.998478
S.E. of regression	0.008481
Sum squared resid	0.007552
Log likelihood	469.3543
F-statistic	3032.914
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dari Eviews 10

Gambar II. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R kuadrat sebesar 0,998808 atau 99,8808% menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu Pengangguran, Kemiskinan, serta Jumlah Pembayaran Infaq, mampu menjelaskan variasi variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,8808%. Sedangkan sisanya sebesar 0,1192% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan hasil penelitian pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, dan Jumlah Pembayaran Infaq terhadap Index Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Variabel pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat. Ketidak signifikannya ini dapat dijelaskan karena pengaruh pengangguran terhadap IPM lebih kompleks dan dipengaruhi oleh aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Seseorang yang menganggur namun tetap mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui program sosial tidak langsung menurunkan IPM.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
Selain itu, data pengangguran yang bersifat agregat mungkin tidak cukup mewakili kualitas tenaga kerja, seperti pengangguran terdidik atau struktural.

Variabel kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita lebih dominan memengaruhi kemiskinan. Masyarakat miskin masih dapat memperoleh layanan pendidikan serta kesehatan melalui program pemerintah, sehingga kemiskinan tidak secara langsung menurunkan IPM.

Variabel jumlah pembayaran infaq secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap index pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat. Ketidaksignifikansi ini mungkin karena kontribusi infaq terhadap anggaran pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, relatif kecil. Meskipun pembayaran infaq meningkat, dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya infaq dan mendorong peningkatan jumlah serta frekuensi pembayarannya melalui edukasi, kampanye sosial, dan inovasi sistem pembayaran yang lebih mudah dan menarik.

Variabel Pengangguran, Kemiskinan, dan Jumlah Pembayaran Infaq memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama dapat memengaruhi index pembangunan manusia di provinsi jawa barat. Karena ketiganya saling berkaitan dan saling mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, maka ketika diuji secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan atau pencapaian index pembangunan manusia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas maka disimpulkan, secara parsial variabel pengangguran, kemiskinan, dan jumlah pembayaran infaq tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masingmasing variabel memiliki keterkaitan yang kompleks dengan IPM dan dipengaruhi oleh faktorfaktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Meskipun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, ketika pengangguran, kemiskinan, dan infaq dianalisis secara bersamaan, ketiganya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kualitas pembangunan manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan integratif dalam upaya meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Barat

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Abdul Husenudin. 2024. "Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023."

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 6(6).
doi:10.47467/alkharaj.v6i6.1771.

Nyoman Lilya Santika Dewi dan I. Ketut Sutrisna. 2014. "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3(3).

Permadi, Andrean, Eni Susilowati, Sri Hariyanti, dan Dewi Nur Alfa Damayanti. 2023. "Causality of Consumption, Government Expenditure, and Distribution of ZIS Funds (Zakat Infaq and Shodaqoh) on Indonesia's Economic Growth." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 5(5): 846–55. doi:10.37275/oaijss.v5i5.180.

Rahayu, Yunie. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi." *EKONOMIS: Journal of Economics and Business* 2(I): 165. doi:10.33087/ekonomis.v2i1.40.

Ramadanisa, Nadhifa, dan Nunuk Triwahyuningtyas. 2022. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(7): 1049–62.

Yusuf, Saifudin, Imam Nur Ngaini, Andrean Permadi, Wahidatun Nafiah Al, dan Hardining Estu M. 2025. "Zakat Calculator Application: Enhancing the Academic Performance of Islamic Economics Students." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 8(1): 1967–79. doi:10.37275/oaijss.v8i1.285.